



**Monopoli Lada dan Emas di Pantai Barat Sumatera:
Konflik Internal Melayu dan Intervensi VOC
dalam Narasi *Hulubalang Raja* Karya Nur Sutan Iskandar**

Moh Atikurrahman
UIN Sunan Ampel Surabaya

atiquurrahmann@gmail.com

Meiyr Nur Laili
UIN Sunan Ampel Surabaya

meyranurlaili@gmail.com

M. Ridwan
UIN Sunan Ampel Surabaya

ridwanabubakar59@gmail.com

- *Received:* 07.07.2022
- *Accepted:* 07.11.2022
- *Published:* 01.12.2022

Abstract: *In the Indonesia-centrism historiography devide et impera is generally understood as the intrigue of the colonizer to dominate the archipelago. Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)'s cunning tactic is related to the colonialism of abundant natural resources in the archipelago. The historical narrative that emerged was that the VOC was accused of being the ringleader of dividing the nation in order to smooth out the ambitions of monopoly on spices and other commodities. The European Meneer was labeled as an antagonist who maneuvered in order to control the maritime trade network of the archipelago. On the other hand, in historical reconstruction, trade competition between brothers and/or local rulers tends to be ignored. In fact, their conflict (internal Malay) is more entrenched, massive, and latent. This article aims to explore medieval primordial conflicts along the West Coast of Sumatra. As a narrative balance, the novel Nur Sutan Iskandar, which takes the background from 1665-1668, is examined because it offers an alternative discourse about a dramatic chronicle between traders and rulers of Aceh and Minangkabau. In modern Indonesian literature, Hulubalang Raja (1934) is known as a historical literary work. From the perspective of New Historism, the conflict between Raja Adil and Hulubalang Raja is a representation of the Malay people. The colossal conflict between the Malays is understood as the*

author's literary strategy to trick Balai Pustaka's censorship. In addition, the text of the story can also be interpreted as a message to the readers of the 30s decade who are experiencing contractions to realize the idea of a nation-state which will later be called "Indonesia". Instead of cornering the Kompeni, the main problems of the people of the archipelago at that time were exposed through colossal conflicts between the nation's children. In the romance narrative of the Balai Pustaka tradition, the dominant narrative is the internal conflict of the Malay. Meanwhile, the double storylines of the shortcut novels seem confusing and incoherent. However, the fictional building was related to the repression of the colonial side through Balai Pustaka which aggressively censored, tightened, and banned books that were considered subversive to the power of the Dutch East Indies.

Keywords: Hulubalang Raja, Nur Sutan Iskandar, Malay, Colonialism, New Historicism

Abstrak: *Dalam historiografi Indonesiasentris Devide et Impera galib dipahami sebagai intriks kompeni Belanda terkait penguasaan wilayah Nusantara. Siasat licik Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) itu berelasi dengan kolonialisme sumber daya alam yang melimpah di wilayah kepulauan. Narasi sejarah yang mengemuka, VOC dituduh sebagai biang keladi pemecah belah bangsa lantaran ambisi untuk memonopoli rempah dan komoditas unggul lainnya. Meneer Eropa itu dicap sebagai antagonis yang bermanuver demi menguasai jaringan perdagangan maritim Nusantara. Sebaliknya dalam rekonstruktif sejarah, persaingan dagang antarsaudar dan/atau penguasa lokal cenderung diabaikan. Padahal konflik mereka (internal Melayu) lebih mengakar, masif, dan laten. Artikel ini bertendensi untuk mengetengahkan konflik primordial abad pertengahan di sepanjang Pantai Barat Sumatera. Sebagai perimbangan naratif, roman Nur Sutan Iskandar yang mengambil latar tahun 1665-1668 ditelaah karena menawarkan wacana alternatif seputar kronik dramatis antarpedagang sekaligus penguasa Aceh dan Minangkabau. Dalam khazanah kesusastraan Indonesia modern, Hulubalang Raja (1934) dikenal sebagai karya sastra sejarah. Dari paradigma Historisme Baru konflik antara Raja Adil dengan Hulubalang Raja adalah representasi klasik manusia Melayu. Konflik kolosal anak bangsa Melayu dipahami sebagai strategi literer pengarang untuk mengelabui sensor Balai Pustaka. Selain itu teks cerita dapat diartikan sebagai maklumat bagi sidang pembaca dekade 30-an yang tengah mengalami kontraksi untuk mewujudkan gagasan negara-bangsa yang kelak disebut sebagai "Indonesia". Alih-alih menyudutkan kompeni, problem utama masyarakat Nusantara kala itu diekspos melalui konflik kolosal antaranak bangsa. Dalam narasi roman tradisi*

Balai Pustaka itu naratif yang dominan justru konflik internal bangsa Melayu. Sedangkan jalan cerita ganda novel sepintas lalu tampak membingungkan dan tidak koheren. Namun bangunan fiksional tersebut bertalian dengan represi pihak kolonial melalui Balai Pustaka yang gencar melakukan sensor, pembredelan, dan pelarangan buku-buku yang mengancam kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.

Kata Kunci: *Hulubalang Raja*, Nur Sutan Iskandar, Melayu, Kolonialisme, Historisme Baru

*“Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki.
Berguru kepalang ajar, bak bunga kembang tak jadi.”*

Hulubalang Raja (1948)

1. Pendahuluan

Antara teks sejarah dan teks sastra terdapat kesamaan. Keduanya merupakan produk bahasa, wacana, sekaligus pengalaman manusia sebagai konteks naratifnya (Purwanto, 2001). Baik sejarah atau sastra sama-sama merekam realitas. Bedanya, sebagai ilmu tugas sejarah tertuju pada objektifikasi kehidupan. Sedangkan tanggung jawab sastra sebagai kreasi imajinatif terletak pada subjektifikasi kehidupan (Kuntowijoyo, 2004). Memang, antara dokumen sejarah dan karya sastra terdapat perbedaan struktur dan substansi. Namun, narasi faktual dan fiksional adalah citra diskursif dari fakta kemanusiaan.

Sebagai realitas yang aktual di masa silam, sejarah diyakini sebagai representasi dari fakta yang tertimbun oleh titimangsa yang kadung lewat yang mustahil dijangkau seorang sejarawan. Secara naratif, memang hanya sejarawan yang menghasilkan masa lalu. Namun, masa silam sendiri telah terjebak dalam dimensi waktu dan ruang tanpa pernah dapat dijangkau kembali secara fisik. Alhasil, rekonstruksi sejarah menjadi produk subjektif dari sebuah proses intelektual (tafsir) yang dilambangkan dalam simbol-simbol kebahasaan. Narasi melalui bahasa senantiasa dinamis dari titik waktu beralih ke titik waktu lainnya, dari satu tempat berpindah ke tempat lainnya, dan dari seorang ke seorang lainnya (Purwanto, 2001).

Sebagai teks naratif, sastra justru lebih berhasil menampilkan citra dirinya sejajar sebagai sejarah karena mampu menghadirkan situasi

faktual dari masa lalu sebagai sebuah narasi melalui imajinasi kebahasaannya (Purwanto, 2001). Di dalam novel sejarah Indonesia peristiwa-peristiwa sejarah bercampur dengan peristiwa-peristiwa imajinatif ciptaan pengarang. Hal itu disebabkan oleh tuntutan dua faktor yang saling bertentangan. Di satu pihak, dokumen-dokumen sejarah tidak menyediakan rekaman-rekaman peristiwa yang memadai. Di lain pihak, kodrat hukum novel menuntut agar novel sejarah memberikan gambaran mengenai dunia yang dapat dibayangkan (*imaginable*), terutama peristiwa-peristiwa yang terjalin secara kausalitas (Faruk, 1986). Untuk meniru pernyataan Sapardi Djoko Damono (1978), teks sastra mampu "...menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati manusia dan perasaannya". Dengan kata lain, narasi sastra memungkinkan sebuah alternatif estetis untuk menyesuaikan diri serta melakukan perubahan pada suatu kondisi masyarakat.

Dengan subjektifitas yang dikandung, teks sastra melampaui deskripsi normatif disiplin ilmu seperti yang ditawarkan sejarah atau sosiologi yang lebih empiris dan positivistik (Atikurrahman et al., 2021). Kebenaran sejarah maupun sastra merupakan kebenaran yang relatif (Purwanto, 2001). Keduanya bagian dari fakta kemanusiaan (Kuntowijoyo, 2004, 2006). Oleh sebab itu, fakta dan fiksi tidak lantas diasosiasikan secara kaku hanya dengan salah satu di antara keduanya, hanya berkaitan dengan sastra atau hanya dengan sejarah (Purwanto, 2001). Sastra adalah cermin optikal suatu jaman. Dalam pandangan ini sastra diandaikan sebagai pantulan langsung pelbagai segi struktur sosial, hubungan kekeluargaan, pertentangan kelas, dan sebagainya (Damono, 1978; Faruk, 2013). Raymond Williams (2015) menyebut relasi antara masyarakat dan kebudayaan (termasuk karya sastra) merupakan totalitas yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Struktur naratif sejarah terbentuk dari evidensi, informasi, dan fakta yang berguna untuk menjelaskan realitas. Sedangkan struktur sastra terbangun dari strukturalisasi kemungkinan, ekspresi, dan imajinasi yang berguna untuk mengadili realitas (Kuntowijoyo, 2004). Lantas, meminjam pembuka tulisan Purwanto (2001), "Ketika sastra dan sejarah dibicarakan secara bersama-sama, apakah ada fiksi di

dalam sejarah dan apakah ada fakta di dalam sastra?" Dalam khazanah kesusastraan Indonesia modern jamak karya sastra yang justru dilatarbelakangi dan/atau memiliki nilai sejarah. Relasi fiksional-faktual itu, salah satunya tampak dalam roman *Hulubalang Raja* (1934), karya sastra romantik dari tradisi Balai Pustaka.

Selama ini telaah-telaah terhadap roman *Hulubalang Raja* lebih banyak berfokus pada historisitasnya. Faruk (1986) menjabarkan jika roman Nur Sutan Iskandar berisi cerita atau rangkaian peristiwa yang bertalian dengan hubungan terbangun antara Minangkabau, Aceh, dan Belanda pada awal masuknya bangsa yang terakhir itu di Indonesia terutama Sumatera Barat. Wartini (2015) dan Despy (2021) menganggap *Hulubalang Raja* dapat disejajarkan dengan tulisan-tulisan sejarah konvensional. Sedangkan pengarangnya disebut patut diapresiasi sebagai "sejarawan" karena berkontribusi dalam historiografis Indonesia. Jassin (1967) menyebut pola pengembaraan dan penyamaran dari cerita-cerita Panji ternyata menjadi pola sarana perangkaian peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam roman (Faruk, 1986). Tak jauh berbeda, Dapit et al., (2020) menelaah roman Balai Pustaka itu dari perspektif poskolonial. Fakta yang ditemukan dalam teks sastra terdapat resistensi dan mimikri dalam penggambaran konflik roman. Namun demikian, selain lingkup pembahasan tulisan-tulisan tersebut masih deskriptif, ternyata hasil-hasil telaah itu belum mampu mengungkapkan persoalan substansial dalam novel, yakni: (1) narasi novel Nur Sutan Iskandar yang lebih menekankan konflik internal Melayu (terutama antara Raja Adil dan Hulubalang Raja); (2) alur ganda dalam roman *Hulubalang Raja* sebagai teknik bercerita yang dipilih pengarang; serta (3) pilihan berisiko yang diambil pengarang dengan menerbitkan karya yang justru menggambarkan perlawanan pribumi terhadap kolonial.

Terkait fakta-fakta di atas tulisan ini hadir sebagai usaha untuk memahami kebijaksanaan masa silam dari pelbagai keterbatasan pada masa sekarang. Di sisi lain, harus diakui historiografi Indonesia terkesan mengambil jarak dan seperti enggan melirik teks atau narasi sastra sebagai alternatif dan kemungkinan rekonstruksi dan/atau dekonstruksi kejadian-kejadian masa silam. Hanya segelintir ahli

sejarah yang dapat dikatakan instens mengaitkan sejarah dan sastra dalam telaah-telaah mereka. Untuk menyebut beberapa Savitri Scherer, Hilmar Farid Setiadi, dan Sony Karsono merupakan barisan sejarawan yang banyak menyadap getah estetika karya sastra.

Dalam sebuah sarasehan yang digelar Dewan Kesenian Jakarta (1970), Taufik Abdullah sempat menyinggung minimnya simbiosis antara kajian sejarah dan telaah sastra sebagai suatu cara tersistem (*interdisciplinary approach*) untuk memahami masa silam. Antara teks dan konteks dalam relasi sejarah-sastra bukanlah sebuah anakronisme. Dalam *Modern Indonesia Literature* A. Teeuw (1967) menyebut karya-karya sastra Indonesia modern awal kental dengan diskursus sosial-politik pranasional yang historis. A.H. Johns (1979) dalam *The Novel as a Guide to Indonesian Social History* menilai jika kajian historiografi Indonesia perlu dan sangat mungkin untuk mempertimbangkan pelbagai alat bukti (*evidence*), termasuk sastra. Karena “...in the modern era a great source of information may be found in a literary form which is an innovation for Indonesia, the novel... Literary sources, of course are not a substitute for history, but they contribute something to our perceptions of a period – of its values, of what it was like to live through, of its ambience and character. There is something to be gained then, in using them in this way, even at the risk of falling into the dreaded “literary fallacy”. Sedangkan korelasi teks dan konteks dalam relasi sejarah-sastra tampak dalam hasil telaah yang dilakukan oleh Foulcher (1987, 2008), Tickell (2008, 1982), Anderson (2020), Shiraishi (1997), Siegel (1979, 2021), Chambert-Loir (2016, 2018), termasuk Hilmar Farid (1991) dan Karsono (2021, 2022).

2. Metode

Untuk mengisi beberapa hal yang belum terjawab, tulisan ini menggunakan pendekatan historisme baru (*new historicism*) dalam memahami sistem semiotik roman Nur Sutan Iskandar (2011). Sebagai terma, historisme baru adalah usaha pembaharuan paradigmatis yang dianggap sudah lapuk, yaitu paradigma dalam historisme lama yang bersifat makro atau meso-struktural dan cenderung menyepelkan

peranan bahasa (*linguistic turn*). Dalam sejarah tertulis yang rekonstruktif, sejarah mikro berupa studi kasus kecil untuk menjelaskan – bukan menggeneralisasi – sebuah fenomena sejarah besar (Robisheaux, 2017). Potensi pengungkapan sejarah mikro telah ditunjukkan dalam banyak penelitian, seperti Marshall Berman (1988) terhadap puisi Charles Baudelaire; Richard Sennett (1994) pada novel E.M. Forster; atau William H. Frederick (1997) tentang ide-ide Armijn Pane (Karsono, 2022).

Dalam historisme baru bahasa novel menjadi elemen yang substansial, sebuah kesadaran yang tidak terpisahkan dalam narasi sejarah (Munslow, 2006). Greenblatt menyebut historisme lama terlalu monologis, hanya tertarik menemukan visi politik tunggal (seperti konsep *langue* dalam linguistik Saussurean), percaya sejarah bukan hasil interpretasi sejarawan, dan dianggap sebagai hasil kepentingan kelompok sosial tertentu dalam pertentangannya dengan kelompok lain (Purwanto, 2001). Sebagai negasi paradigmatis, historisme baru disebut bercorak posmodern karena masa lalu adalah diskursus dari produk interpretasi naratif dan eksplanasi manusia yang tidak bebas dari personalitas yang kontradiktif dan ambivalen.

Sebagai paradigma sejarah yang dekonstruktif, Alun Munslow (2006) menyebut historisme baru tetap berpangkal dari kesadaran jika narasi sejarah tetap berdasar pada fakta meskipun ia beranggapan sejarah tidak akan hadir (*exist*) bagi sidang pembaca sampai sejarawan menuliskannya dalam bentuk naratif historis. Realitas masa lalu bukan peristiwa masa silam sebagaimana yang terjadi. Ia sekadar laporan tertulis. Oleh sebab itu sejarah tidak sekadar pengkajian tentang perubahan dalam konteks waktu. Sebagai satu disiplin, sejarah mengkaji informasi atau pengetahuan yang bersumber dari fakta masa silam yang dihasilkan sejarawan. Alibinya, kebenaran sejarah baru memperoleh status terverifikasi (*verified*) dan masuk akal jika tidak hanya berpangkal dari validitas empirik melainkan juga berasal dari validitas normatif.

Pada tingkat metodologis, historisme baru mendorong munculnya kesadaran dekonstruktif bahwa kejadian-kejadian sehari-hari (seperti terma *parole* dalam linguistik poststruktural) merupakan

bagian integral dari kausalitas yang menyejarah. Idealnya pengkajian sejarah didorong bergerak dari tataran makro (sejarah besar) dan meso (sejarah madya) yang didasarkan pada tradisi pendekatan ilmu-ilmu sosial menjadi level mikro (sejarah kecil) yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari dari kebanyakan orang. Sejarah komunal banyak ditemukan dalam karya-karya sastra. Di lain pihak, sejarah sosial cenderung gagal merekonstruksi dan memahami aspek kemanusiaan dari fakta-fakta historis. Karena sejarah yang ditambahkan pada pendekatan ilmu-ilmu sosial cenderung menghalangi aspek kualitatif suatu masa lalu (Purwanto, 2001). Sedangkan sejarah mikro menampilkan wajah-wajah kebanyakan manusia dari masa lalu yang condong komunal bahkan anonim. Wajah masa lalu itu tampak dalam protagonis Sutan Ali Akbar yang berperan sebagai Raja Adil dan Sutan Malekewi yang tak lain Hulubalang Raja. Kedua saudara ipar tersebut merupakan representasi manusia Melayu masa lalu. Membaca novel Nur Sutan Iskandar sama saja dengan membuat lubang untuk mengintip (bahkan mungkin dapat meneropong) masa silam barang sebentar, dengan lebih presisi.

3. Hasil dan Pembahasan

Mengapa “Hulubalang Raja”, dan bukan “Raja Adil”?

Bagi sidang pembaca sastra, kecenderungan untuk memihak pada dua sosok protagonis utama roman akan lebih condong terarah kepada Ali Akbar tinimbang Malekewi. Hal ini disebabkan dalam konteks pasca kemerdekaan tindakan Raja Adil untuk memberontak kepada kelaliman penguasa lokal pada gilirannya mengarah pada perlawanan terhadap kolonialisme Belanda terasa lebih diterima akal. Ali Akbar memang memulai perang karena motif dendam. Puteri Ambun Suri dijebak Puteri Kemala Sari, istri Muhammad Syah anak dari Raja Malafar Syah yang pro kompeni (lih. Bab 1-3). Sedangkan Hulubalang Raja pernah berpihak, berperang, dan menjadi bagian dari eksodus serdadu kompeni untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Sumatera yang pro terhadap Aceh. Pendek kata, biografi Ali Akbar sebagai protagonis ideal relatif lebih bersih dan herois, terutama usaha untuk

melawan penjajah Belanda. Di lain pihak, Malekewi yang memilih berkomplot dengan kompeni dengan maksud melindungi wilayahnya dari ancaman perompak Aceh tampak kontradiktif dan ambivalen (lih. Bab *Perang Pauh*).

Sepintas lalu, sosok Malekewi memiliki beberapa kemiripan dengan jalan hidup kekasih Sitti Nurbaya dari roman Marah Roesli yang dipublikasikan Balai Pustaka pada dekade sebelumnya (1922). Jika Samsubahri memilih menjadi pasukan khusus kolonial (*Marsose*) karena depresi setelah kematian kekasihnya (Atikurrahman & Ilma, 2021; Atikurrahman et al., 2021), Malekewi lebih memilih bersekutu dengan kompeni lantaran memiliki kesamaan kepentingan. Namun, seperti Samsulbahri yang akhirnya dapat menuntaskan balas dendam kepada Datuk Meringgih, Malekewi juga harus membayar dengan harga yang mahal untuk memenuhi hasratnya, yakni memerangi orang sebangsa sendiri, orang Melayu yang menolak tunduk kepada kebijakan kompeni Belanda.

Petualangan Malekewi dimulai karena kedongkolan. Setelah orang tuanya yang kaya raya menolak memberikan modal sabung ayam, Malekewi ngambek dan memutuskan untuk kelayapan hingga akhirnya menjadi pemimpin hulubalang di Padang yang bersahabat dengan kompeni. Namun perlu juga dicatat bahwa dalam konteks masa itu, di mana ide tentang negara-bangsa Indonesia belum hadir, keberpihakan Malekewi terhadap kompeni memang wajar. Dalam pengembaraannya, Hulubalang Raja pernah disamun atau dirampok orang Aceh. Di tengah jalan, musuh utama kompeni di Sumatera itu membunuh bujang (baca: asisten) dan beberapa saudagar nahas. Untungnya, meskipun terluka parah karena sabetan senjata tajam, Malekewi berhasil diselamatkan orang Padang yang notabene memiliki permusuhan dengan Aceh.

Selama berada di Padang, Malekewi menjadi kaki tangan Orang Kaya Kecil, sahabat Groenewegen. Malekewi menyamarkan identitasnya sebagai "Si Buyung" (sekali lagi! Mirip Samsulbahri yang ketika bergabung dengan dengan dinas kemiliteran kolonial mengubah namanya menjadi Kolonel Mas, pembalikan dari nama asli Kolonel Sam). Kelak Si Buyung menjadi petarung andal yang berjuluk

Hulubalang Raja dan berperang dengan kompeni untuk memberantas musuh-musuhnya, orang Melayu yang berkomplot dengan Kerajaan Aceh. Jadi, karena dendam pribadi terhadap perompak Aceh dan hutang budi terhadap orang Padang, Malekewi bermetamorfosis menjadi Hulubalang Raja. Pendeknya, pada satu sisi jalan hidup Hulubalang Raja tidak beruntung karena “ditakdirkan” menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Sama, “takdir” nahas mengantarkan Ali Akbar bermetamorfosis menjadi Raja Adil karena sakit hati atas kematian adik perempunnya. Jadi motif awal Raja Adil bukan karena kesengsaraan rakyat akibat intervensi Kompeni Belanda di Inderapura. Perang Raja Adil dilatarbelakangi motif dendam.

“... perkara ini sudah hamba sampaikan pada Muhammad Syah; hamba minta kepadanya, supaya Kemala Sari disiasat dan diperiksa.”

“Apa jawabnya?”

“Mula-mula ia terperanjat, seakan-akan percaya akan keterangan hamba itu. Ia berjanji akan menyiasat istrinya. Tetapi keesokan harinya, ketika hamba datang menghadap pula, berubah benar pendiriannya dari kemarin dahulu itu. Hamba diusirnya seperti anjing...di hadapan sultan tua. Katanya, hamba mengada-ada saja, berbuat fitnah kepada istrinya yang “lurus” dan “baik-baik” itu. Dan sultan Malafar Syah pun mengancam hamba akan dibinasakannya, kalau hamba berani menyebut-nyebut perkara itu jua.”

...

“Hendak engkau pengapakan putri Kemala Sari itu?”

“Sekarang kita tidak berhadapan terus dengan perempuan itu lagi, melainkan dengan sumainya dan mertuanya.”

“Habis?”

Orang muda itu mendekatkan mulutnya ke telinga ayahnya, lalu berbisik. “Sebelum hamba putar negeri ini, belum senang hati hamba. Dengan sendirinya, kalau kehidupan sultan sudah terancam, Kemala Sari takkan senang diam lagi. Dosanya akan menghukum jiwa raganya, Ayah!”

Raja di Hulu tercengang... Ali Akbar berkata pula dengan perlahan-lahan dan lambat-lambat, “Jangan Ayah cemas. Sudah selesai belaka! Sekalian orang besar-besar, yang berkuasa benar kepada rakyat dan rasa-rasa patut campur serta dapat berpihak kepada kita, sudah hamba jelang dengan diam-diam dan sudah hamba tanyai nafsunya. Bagai mengayuh biduk hilir, –sekaliannya mengeras supaya hamba segera memulai pekerjaan itu.”

“Ali Akbar, Anakku,” kata Raja di Hulu dengan suara agak gemetar, serta memperhatikan air muka anaknya. “Sampai ke situ tidak terpikir olehku! Ingat, apa dan betapa akibat perbuatanmu itu kelak kepada negeri dan rakyat. Tidak ada sesutau putar negeri, pemberontakkan atau peperangan yang tidak menelan dan memusnahkan nyawa dan harta benda rakyat, Buyung!”

“Barangkali, –tetapi hamba membela adik hamba, dan rakyat hendak melepaskan diri daripada kelalamin dan tindihan.

...

“Dasar pikiranmu hanya balas dendam.”

“Mungkin begitu mulanya. Akan tetapi sekarang, sebagai anak muda hamba tak dapat membiarkan kelaliman terus-menerus. Hamba harus pula membela rakyat, bagi masa yang akan datang. Sebab itu izinkan hamba pergi, Ayah.”

Raja di Hulu termenung sejourus, sambil mengenyitkan alis matanya. Tiba-tiba ia pun berkata dengan tegas, “Sudah kaupikirkan benar-benar, bahwa pihak sultan adalah mempunyai tulang punggung yang kuat?”

“Siapa? Rakyat sudah berpihak kepada kita sekaliannya.”

“Orang asing, –kompeni!”

Merah padam air muka orang muda itu, dan bertambah cepat jalan darahnya.

“Oh, kalau sultan mau menjual negeri, semakin kerasalah hasrat hati hamba hendak menumbangkan dia dari atas singgasananya. Hal itu akan hamba bicarakan dengan mamanda Maulana dan kawan yang lain-lain kelak.”

Dari narasi di atas tampak bahwa motif awal pemberontakkan yang disulut Raja Adil dan kemudian merambah sebagai gerakan perlawanan kolonialisme karena dilatarbelakangi ketidakbijakan calon ipar Ali Akbar, Muhammad Syah serta Malafar Syah, Raja Hilir Inderapura, terkait kematian Puteri Ambun Suri. Dalam konstelasi hierarkis Inderapura, relasi antara Ali Akbar dan Muhammad Syah tentunya tidak setara. Oleh sebab itu anak dari Raja di Hulu itu mencari dan mengumpulkan bala serdadu dari pihak-pihak yang sakit hati terhadap penguasa Inderapura yang dibekengi kompeni. Ali Akbar menemukan sekutu awal yang potensial pada sosok Raja Maulana.

Sakit hati! Bukan terhadap kepada Malafar Syah saja, tetapi kepada sultan muda juga, karena ia tiada memperhatikan dan mempertahankan hak rakyatnya. Cuma-cuma saja ia jadi sultan! Dan perjara kehilangan putri Ambun Suri yang didiamkan itu pun

menambah besar dendam semat kesemat rakyat kepada Muhammad Syah yang lemah itu.

Diamati dengan seksama, perang Raja Adil sejatinya merupakan sebuah pemberontakan terhadap penguasa lokal yang lalim tinimbang melawan kolonial. Perang Pauh yang melibatkan Raja Adil dan Hulubalang Raja adalah perang lokal, di satu pihak didukung Aceh di pihak lain di dukung kompeni. Demikian pula, perang Hulubalang Raja. Bukan untuk menjadi antek-antek kompeni. Akan tetapi terdapat faktor kepentingan yang sama antara Padang dan Kompeni, yakni melawan pihak Aceh yang kerap kali menjarah harta benda masyarakat Padang. Raja Adil menempatkan Aceh sebagai musuh kompeni yang dapat dimanfaatkan untuk menundukkan Inderapura. Dengan kompeni berfokus pada Aceh, Raja Adil dapat berhadapan langsung dengan musuh yang sebenarnya, yakni Muhammad Syah dan Malafar Syah. Bahwa motif pihak Padang dan Hulubalang Raja bukan sebagai jajahan Belanda, melainkan sebagai rekan dagang tampak dalam kedongkolan Hulubalang Raja terhadap Abraham Verspreet yang meminta orang Padang untuk mendukung perang kompeni di Pauh, dan melawan pasukan Raja Adil.

Dalam peperangan hebat di Pauh, Hulubalang Raja terluka parah bahkan hampir terbunuh. Setelah pulih, Hulubalang Raja menghilang dari Padang. Disebutkan Hulubalang Raja ingin mencari adiknya yang konon disekap orang Aceh, namun berhasil diselamatkan Raja Adil dan dijadikan sebagai permaisuri. Namun ditimbang-timbang dengan seksama, bahwa motifnya untuk mencari Andam Dewi terkesan mengada-ada. Mengapa usaha itu tidak dilakukan jauh-jauh hari mengingat Hulubalang Raja mengetahui adiknya pergi dan menghilang dari rumah untuk menyusul dirinya. Namun Hulubalang Raja justru mencari Andam Dewi setelah kecewa dengan keegoisan Verspreet, pengganti Groenewegen yang bijak. Pada bab terakhir, digambarkan Hulubalang Raja tertangkap dan dibawa ke hadapan Raja Adil. Terjadi islah, di mana kemudian Hulubalang Raja insyaf atas masa lalunya.

Lantas, mengapa pengarang lebih memilih protagonis “Hulubalang Raja” tinimbang “Raja Adil” sebagai judul romannya?

Versi yang Kita Baca Hari Ini adalah Revisi (1948)

Pada *Kata Pengantar* buku yang bertarikh 2009, karya sastra yang ditulis Nur Sutan Iskandar itu disebut merujuk pada tesis akademik (*academisch proefschrift*) Kroeskamp (1931), *De Westkust en Minangkabau 1665-1668*. Mengambil latar pesisir barat Sumatera tahun 1665, roman *Hulubalang Raja* dikategorikan sebagai prosa sejarah. Narasi kisah menyajikan konfrontasi antara Minangkabau dan Aceh yang diselingi intervensi kompeni. Gambaran dramatis tentang manusia Melayu Abad Pertengahan tampak pada sosok Ali Akbar atau Raja Adil dan Malekewi si Hulubalang Raja. Sebelum kedatangan tengkulak Eropa, kawasan Pantai Barat Sumatera telah muncul gejolak berkepanjangan akibat dominasi dan monopoli perdagangan lada dan emas dari daerah pedalaman Sumatera. Pesisir Barat Sumatera menjadi medan konflik yang sengit terjadi antara tahun 1665-1668 (lih. juga Nur, 2014). Namun, pada bagian berikutnya yakni *Prakata* roman yang ditulis Nur Sutan Iskandar, tertulis:

Prakata

Cerita ini dikarangkan dan diterbitkan pada tahun 1934.

Dalam beberapa waktu saja sudah habis terjual!

Banyak permintaan datang kepada Balai Pustaka supaya buku ini dicetak terus. Sungguhpun permintaan itu disambut dengan besar hati serta terima kasih, tetapi sekarang baru dapat diperkenankan, yaitu sesudah saya beroleh kesempatan akan agak menyesuaikan isinya dengan perasaan yang tersembunyi atau disembunyikan adanya.

Lukisan pro dan kontra Kompeni masa itu diperjelas.

Jakarta, Juli 1948

Penulis

Roman *Hulubalang Raja* yang dapat diakses pada hari ini tak lain adalah edisi penyelarasan (...*sesudah saya beroleh kesempatan akan agak menyesuaikan isinya dengan perasaan yang tersembunyi atau disembunyikan adanya*). Namun jika disimak secara menyeluruh jalan cerita utama roman Nur Sutan Iskandar itu tidak berubah secara substansial. Hal itu

tampak pada deskripsi tokoh serta narasi novel yang masih menekankan peranan vital dan lukisan dominan melalui proyeksi konflik antarorang Melayu, Raja Adil vs Hulubalang Raja. Sehingga dekontekstualisasi roman seputar peranan dan keterlibatan pihak kompeni dalam konflik Pesisir Barat Sumatera (*Lukisan pro dan kontra Kompeni masa itu diperjelas*) lebih sekadar efek estetis yang coba dihadirkan pengarang untuk sidang pembaca yang telah berubah, masyarakat Indonesia yang merdeka.

Sesuai tarikh *Prakata* novel, prosa versi revisi itu selesai pada 1948, dua tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Masa-masa di mana nasionalisme Indonesia baru masih sangat mengharu-biru. Tidak mengherankan jika pada *Hulubalang Raja* edisi revisi teks substantif yang ditekankan pengarang justru semangat nasionalisme dari sebuah negara-bangsa yang baru lepas dari penjajahan. Sedangkan terkait alur ganda roman *Hulubalang Raja* pengarang sengaja memilih teknik bercerita (*plot*) memecah sebagai pilihan teknis yang paling realistis. Alur cerita tersebut sebagai upaya penyamaran atau pengaburan fokus pembaca terkait keberadaan dan peranan kompeni dalam relasi konflik dengan orang Melayu. Dengan cara demikian, pengarang hendak mengaburkan esensi pikiran dirinya dan karya sastra yang dibuatnya untuk tidak dianggap subversif oleh pemerintah Hindia Belanda.

Untuk diketahui, dekade 30-an dikenal sebagai periode paling riskan dalam sejarah kolonial terkait sensor tulisan (baik tulisan sastra dan nonsastra) yang dilakukan pihak Balai Pustaka. Setelah Rinkes mengeluarkan aturan main literasi awal Abad XX (atau yang dikenal sebagai *Nota Rinkes*), pemerintah Hindia Belanda melalui Balai Pustaka sangat ketat dalam memerangi para “agitator” kiri yang gemar melaknati orang Eropa dalam karya-karya mereka. Karya para pribumi yang ditulis dalam bahasa “Melayu Pasar” oleh pihak penjajah dicap sebagai “bacaan liar” (Tickell, 2008; Tickell, 1982). Demi kepentingan *rust en orde* (ketertiban dan keamanan), pihak kolonial bersikap galak karena berkolerasi dengan pelestarian kekuasaan kolonial terhadap tanah jajahannya (Atikurrahman & Ilma, 2021; Atikurrahman et al., 2021; Setiadi, 1991; Yamamoto, 2019).

Mari simak:

Pada bab-bab awal novel (Bab 1 hingga Bab 6) pengarang memokuskan kisahnya pada Ali Akbar atau Raja Adil. Lalu pada Bab 7 hingga Bab 11, pengarang mengalihkan sorot penceritaannya pada Malekewi atau Hulubalang Raja. Pada bab-bab berikutnya (Bab 12 hingga Bab 20) secara bergantian pengarang menceritakan Raja Adil atau Hulubalang Raja. Pertemuan keduanya baru terjadi pada Bab 21. Dengan model plot kisah yang tidak linier, plot yang memecah, masing-masing tokoh seolah-olah berdiri sendiri. Konsekuensinya, pembaca sedikit-banyak akan disiksa dalam mengikuti *plot* roman.

Arus pertentangan antara Raja Adil dan Hulubalang Raja memang sengaja dihadirkan pengarang sebagai binier. Dalam hal ini Nur Sutan Iskandar seolah-olah hendak menunjukkan pihak mana yang benar dan mana yang salah. Dari pemilihan judul, pengarang ingin menunjukkan keberpihakan pada kolonial dan saat bersamaan menghujat Raja Adil dengan cara menisbatkan judul roman pada sosok Malekewi. Namun mimikri loyal yang ditunjukkan melalui dikotomi antagonistik itu lantas dicairkan melalui islah, perdamaian antara Raja Adil dan Hulubalang Raja. Dalam bagian akhir cerita roman, secara terang-terangan pengarang mengubah pendirian Raja Adil yang awalnya sangat teguh dan antipati terhadap kolonial. Dengan nasihat iparnya, Hulubalang Raja, pimpinan pemberontak yang sebelumnya tak kenal kompromi luluh dan mau berdamai dengan pihak kolonial.

Dari Groenewegen Ke Verspreet: Intervensi Kolonial

Di abad pertengahan, Islam mendominasi wilayah Nusantara. Kala itu jejaring perdagangan tidak didominasi oleh kerajaan atau kerajaan tunggal. Niaga di Nusantara berlangsung dinamis karena didasarkan pada kolaborasi jaringan dari banyak negara kecil. Di dunia Melayu khususnya telah berkembang suatu pola “*pluricentrism*” ekonomi yang, dalam keragaman budaya dan mobilitasnya, menyerupai perdagangan yang berkembang pesat di Mediterania Timur pada awal era modern (Hefner, 2017; Atikurrahman et al., 2022).

Setelah kedatangan bangsa Eropa, situasi Nusantara lambat-laun berubah. Puncaknya di akhir Abad XIX dan awal Abad XX, orang kulit

putih telah mendominasi dan bahkan menaklukkan wilayah-wilayah pesisir, baik dalam bidang politik dan ekonomi. Kedatangan VOC ke wilayah Nusantara umumnya dan Melayu khususnya mendapatkan pelbagai macam reaksi. Ada penguasa lokal yang memilih bersahabat dengan VOC dan menjadikan mereka sebagai mitra dagang. Namun ada juga pihak lain yang mengambil sikap bermusuhan terhadap *meneer* Eropa. Yang mengambil jalan berisiko untuk berkonfrontasi langsung dengan Kompeni biasanya dilatarbelakangi keberadaan VOC yang dianggap telah mengganggu stabilitas perdagangan lokal dan/atau kerajaan. Sedangkan yang menjadi mitra kolonial menganggap mereka sebagai kolega yang lebih masuk akal. Pihak ini tidak lagi mempertimbangkan mereka berasal dari sesama bangsa kepulauan atau bangsa dari beda benua. Bagi mereka sama saja, orang asing itu tetap menjarah kekayaan alam yang mereka miliki.

“...Sebagai orang muda yang berpelajaran niscaya Tuan tahu dan insyaf bahwa tingkah laku kompeni di seluruh pantai atau pulau kita ini tidak sama dengan perbuatan kebanyakan saudagar, bukan? Nakhida kita selalu mengarungi lautan sampai ke benua Cina dan Jepun, ke Patani dan Parsi, ke tanah Arab dan Madagaskar, hanya dengan niat hendak berniaga semata-mata! Akan tetapi, kompeni berniaga sambil merampas negeri orang. Demikian di Pulau Jawa dan sekarang di sini pula...”

...

“Tetapi dalam peperangan Tuan jadi hulubalang, jadi panglima besara. Sampai hatikah Tuan menembaki bangsa Tuan sendiri...”

“Ampun, Tuanku... Hal itu berlangsung pada peri keadaan semata-mata. Kalau suatu negeri memang penuh dengan penyamun, jadi pokok pangkal huru-hara, walau negeri hamba sendiri sekalipun, niscaya akan hamba hancurkan juga.”

“Itu lebih baik daripada diserahkan kepada bangsa asing!”

“Tapi sudah di tangan bangsa asing jua. Kini bertukan saja, Tuanku. Lepas dari bangsa asing ini, pindah ke tangan bangsa asing itu. Upamanya Pauh dan Kotatengah—apakah yang dapat diharapkan dari kedua negeri itu? Sarang penyamun Aceh...”

“Oh begitu?” kata Raja Adil dengan agak sesak dadanya, “Tidak sesatkan pikiran Tuan itu?”

“Hamba kira, tidak, Tuanku. Sungguh Pauh dan Kotatengah tak dapat hamba puji, tak mungkin hamba pertahankan sebab pemerintahan tidak ada lagi di sana. Orang berbuat sekehendak hati saja, siapa berani siapa di atas, lebih-lebih segala bangsa dari Aceh

telah merajalela di situ. Samun saka, rampok rampas terjadi siang dan malam.”

“Kedua negeri itu di bawah kedaulatan Minangkabau, bukan?”

Namanya saja demikian, Tuanku. Bilakah Yang Dipertuan Minangkabau datang ke sana, bilakah Baginda membela rakyat? Tidak pernah – dan kekuasaan Minangkabau itu di seluruh pantai telah lepas ke tangan Aceh dan sekarang kompeni telah datang menyela pula.

“Sebab kompeni mendapat sokongan dan tunjangan dari orang khianat sepebagai Tuan,” kata Raja Adil dengan tajam.

“Tuanku...”

“Kebenaran itu tak dapat Tuan bantah lagi, seperti kata Taua tadi. Di mana-mana kompeni masuk, berkuasa, lain tidak karena pertolongan bangsa kita sendiri.”

“Akan tetapi, Hamba tiada berasa khianat kepada tanah air!”

“Pauh Tuan hancurkan.”

“Sebab seperti kata Hamba tadi, negeri itu sarang penyamun... Tuanku pun akan berbuat seperti Hamba terhadap negeri Pauh itu. Ya, Tuanku sendiri pun – kalau hamba tidak salah – sengaja berbuat sedemikian terhdap kepada kesultanan Inderapura...”

Setelah memasuki masa pasca kemerdekaan, kenangan tentang kompeni dan kolonialisasi cenderung serba buruk dan selalu negatif. Tentunya monopoli perdagangan yang dilakukan VOC (hingga akhir Abad XVIII) dan Kerajaan Belanda (hingga invansi Jepang pada 1942) menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat Nusantara umumnya dan Sumatera khususnya. Sedangkan perubahan model kolonialisasi, dari mitra dagang menjadi kawula jajahan menjadi kenangan yang ganjil bagi segenap penduduk kepulauan (lih. Atikurrahman & Ilma, 2021; Ricklefs, 2011). Perubahan relasi kolonial-pribumi itu juga ditemukan dalam narasi roman *Sitti Nurbaya*. sedangkan kompeni dan aktivitas kolonialisasi selalu buruk di mata Raja Adil, yang setidaknya mewakili keyakinan kebanyakan masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan.

Di wilayah Sumatra kompeni kerpkali mendapatkan citra buruk dan reaksi negatif sebab tingkah laku mereka yang tidak hanya berniaga. Pihak Eropa memiliki niat lain untuk menguasai tanah warga lokal dan memonopoli jaringan perdagangan yang sudah stabil sejak sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dalam roman *Hulubalang Raja*, pengarang menggambarkan pihak Kompeni Belanda mendapatkan perlawanan sengit masyarakat karena menyepsonori penguasa lokal

yang lalim, seperti Malafar Syah dan Muhammad Syah. Siasat kolonial untuk membantu penguasa lokal yang potensial dilakukan dengan cara memberikan bantuan senjata dan dukungan militer lainnya. Tentu saja ada sejumlah harga mahal yang harus ditebus. Imbalan yang harus diterima pihak Eropa biasanya berupa monopoli perdagangan komoditas yang dimiliki kerajaan mitra.

Dalam perang awal Raja Adil dengan Malafar Syah dan Muhammad Syah, kerajaan Inderapura mendapatkan sokongan militer penuh dari Groenewegen dalam memadamkan makar yang dilakukan kakak mendiang Ambun Suri. Hutang budi terhadap VOC mesti dibayar kontan dengan menumbalkan rakyatnya sendiri, termasuk hal kekecewaan Raja Adil dalam kasus kematian adik perempuannya. Sebaliknya, di mata Hulubalang Raja keberadaan dan peranan kompeni tidak otomatis antagonis dan tidak bijak. Dalam kasus Groenewegen dan Verspreeet, kakak Andam Dewi menganggap *meneer* yang pertama sebagai kompeni yang bijak dan dapat menempatkan diri di antara orang Melayu. Sikap Groenewegen itu tampak dalam konfrontasi awal Ali Akbar dan Malafar Syah, di mana gambaran keterlibatan tentara kompeni hanya kelebatan-kelebatan sebagai persona "tentara putih". Sedangkan *meneer* yang kedua sebagai kompeni yang gegabah dan tidak tahu cara menempatkan diri. Ketika tengah berusaha menaklukkan Pauh dari kendali Raja Adil, Verspreeet membawa serdadu Bugis dan Ambon seperti gambaran invansi untuk sebuah penaklukkan sebuah wilayah.

"Bagaimana, Tuanku? Adakah dapat Betawi meluluskan permintaan kita?"

"Lebih daripada dapat," kata Regen (Orang Kaya Kecil), seraya duduk dengan mengeluh...

"Berlainan benar dengan peri keadaan yang sebenarnya, Tuanku," katanya dengan penuh masam, "tak ubah dengan pendirian tuan Gruys dahulu. Terbalik... Seakan-akan perkara itu sudah jadi perkara kompeni semata-mata! Kita terbelakang – hanya 'harus diminta supaya turut dalam peperangan'. Padahal kita Cuma minta tolong kepadanya."

"Cita-cita kompeni... Tetapi bagaimana timbanganmu?" tanya Orang Kaya Kecil dengan murung.

“Hak kita mesti dipertahankan. Kita ingatkan kepada wakil kompeni itu perjanjian yang telah dibuat dan dijalankan selama ini: dalam perang kompeni tidak boleh terkemuka. Artinya, sebagai sahabat ia hanya akan menolong kita di dalam kesusahan; itu pun jika kita minta tolong kepadanya, seperti sekarang ini. Jadi, bukan kita yang diminta turut dalam peperangan itu.”

“Benar, pikiranku tadi demikian juga!”

Perubahan sikap kompeni dari Groenewegen ke Gruys hingga Verspreet menandai metamorfosis kolonialisme Belanda di Nusantara, termasuk di Pantai Barat Sumatera. Melalui tangan dingin Groenewegen, penguasa pesisir barat Sumatera banyak menjalin kontak dagang dengan pihak VOC. Nama lengkapnya Jan van Groenewegen, mulai bertugas sebagai kepala di Pantai Barat Pulau Sumatera sejak 1662. Ia merupakan kepala yang pertama. Karirnya dimulai sejak 1660 sebagai residen loji di Aceh. Pada tahun yang sama ia dipindahkan ke Padang. Semenjak itu ia berkuasa di Pantai Barat; segala peristiwa, segala kejadian di sana boleh dikatakan sebab karena gerakannya. Groenewegen sudah lama bercampur dengan anak negeri Sumatera, sudah tahu banyak sedikitnya langgam perangai penduduk lokal, berlainan dengan Gruys dan Verspreet yang ceroboh karena mereka nihil pengetahuan tentang dunia Melayu. Di mana Groenewegen tinggal, dengan siapa ia bercampur, ia pandai menarik hati orang sehingga orang lekas percaya kepadanya. Sri Maharaja Ratu Aceh amat baik kepada dirinya sehingga berat benar hati baginda akan melepas dia berangkat dari negerinya (Iskandar, 2011).

Jika awalnya kompeni memiliki banyak sekutu di Pesisir Barat Sumatera hal itu berkat kepiawaian dan tangan dingin Groenewegen, termasuk dengan kerajaan Inderapura yang diserang oleh pasukan Raja Adil. Juga, Aceh dengan kompeni mulanya sekutu sebelum akhirnya terjadi perselisihan antarkeduanya. Konflik Aceh-Kompeni coba dimanfaatkan oleh Raja Adil setelah pasukannya terpojok oleh laskar pribumi dan prajurit kompeni. Setelah bercerai dengan Aceh, kompeni menggalang jaringan kekuatan baru melalui masyarakat Minangkabau.

4. Kesimpulan

Pembahasan repetitif seputar kolonialisme di Indonesia selalu berfokus pada kekuasaan imperial kompeni daripada masyarakat Indonesia. Dalam tradisi sejarah Indonesiasentris langgam ini menjadi arus besar yang sukar dilawan dalam rekonstruksi sejarah kita. Lantas, keberadaan politik pecah belah (*divide et impera*) selalu dipaksa sebagai keinginan pihak kolonial untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya, tanpa menyadari hal itu juga merupakan bagian dari keberlanjutan konflik internal yang sejak semula telah lama ada. Dalam jejaring peristiwa (terutama penekanan naratif roman) yang menggambarkan dua protagonis utama roman Nur Sutan Iskandar – dari semula konflik keluarga antara Raja di Hulu dengan Raja Malafar Syah telah memunculkan sosok Raja Adil sebagai pemberontak dan Hulubalang Raja sebagai orang lokal yang menjalin hubungan istimewa dengan pihak Belanda. Penulisan sejarah yang didasarkan pada prinsip nasionalisme dan patriotisme yang agak “ugal-ugalan” tampak dalam penonjolan prinsip Indonesiasentris yang hiperbolis dalam retorika rekonstruktif. Imbasnya, sejarah seperti mencari kambing hitam. Dalam konteks Nusantara, relasi penjajah-terjajah membutuhkan kambing hitam dalam pengertian “*divide et impera*”!

Sebagai pamungkas, menarik apa yang pernah ditulis Purwanto (2001) mengenai politik pecah belah (ada yang menyebut ‘politik adu domba’) di Melayu, “Keterjebakan historiografi Indonesiasentris dalam determinasi kolonial ini juga terlihat dalam pemahaman tentang perlawanan para Paderi di Sumatera Barat pada paruh pertama abad XIX dan konflik antara ulama dan ulubalang di Aceh”. Galibnya, lanjut Purwanto, historiografi Indonesia pascakolonial memahami Perang Paderi dalam dimensi penjelasan historis yang berkaitan dengan konflik dikotomis, keagamaan dan adat. Dalam narasi faktual yang dipahami saat ini menunjukkan variabel seputar perkara minum tuak, judi, sabung ayam, atau eksploitasi kolonial yang simplisitis. Sedangkan sebuah produk dari rivalitas sosial, ekonomi, kultural, dan bahkan politik antara dua kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat Minangkabau sendiri dengan atau tanpa adanya kolonialisme Belanda. Demikian pula dengan Aceh yang tidak serta-merta dapat dilepaskan

begitu saja dari keberlanjutan proses dinamika internal masyarakat Aceh sendiri, antara *ulebalang* yang pro kompeni dan ulama yang nasional dan melaknati Belanda. *Hulubalang Raja* yang ditulis oleh Nur Sutan Iskandar yang lebih menekankan intrikis antarsesama penduduk Sumatera justru menjadi tampak lebih realistis dan berkesesuaian dengan fakta. Fakta yang kemudian diolah menjadi bahan karya sastra – sebuah roman historis yang imajinatif.***

Daftar Pustaka

- Anderson, B. (2020). Imagined Communities. In *The New Social Theory Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-46>
- Atikurrahman, M., & Ilma, A. A. (2021). Talkin Kematian Romantik Yang Berulang: Max Havelaar, Sitti Nurbaya, dan Kolonialisme. In E. Saparudin (Ed.), *Manis Tapi Tragis: Kisah Saijah-Adinda dalam Max Havelaar* (pp. 176–193). Retrieved from <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/1742/>
- Atikurrahman, M., Ilma, A. A., Dharmasari, L. A., Affanda, A. R., Ajizah, I., & Firdaus, R. (2021). Sejarah Pemberontakan dalam Tiga Bab: Modernitas, Belasting, dan Kolonialisme dalam Sitti Nurbaya. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(1). <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.1.1-22>
- Atikurrahman, M., Indriyani, J. G., & An Adzhani, S. (2022). Pluralism in the Time of Postcolonialism: Cultural Diversity of Malay-Indonesian Archipelago in Upin-Ipin and Adit-Sopo-Jarwo. *NOBEL: Journal of Literature and Language Teaching*, 13(1), 18–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/NOBEL.2022.13.1.18-34>
- Chambert-Loir, H. (2016). Locked Out: Literature of the Indonesian Exiles Post-1965. *Archipel*, (91). <https://doi.org/10.4000/archipel.308>
- Chambert-Loir, H. (2018). *Sastra dan Sejarah Indonesia: Tiga Belas Karangan*. Jakarta: Gramedia.
- Damono, S. D. (1978). *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas. Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta*.

- Dapit, A., Waluyo, P., & Trisari, A. (2020). Resistensi dalam Novel Hulubalang Raja Karya Nur Sutan Iskandar: Kajian Poskolonial. *Jurnal Salaka : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.33751/jsalaka.v2i2.2485>
- Despy, N. P. (2021). Kajian Historiografis Pada Novel “Hulubalang Raja” Karya Nur Sutan Iskandar. *Journal of Islamic History*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.53088/jih.v1i1.114>
- Faruk, F. (1986). *Novel Sejarah dalam Sastra Indonesia Modern*. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/155COnPHddX5qkhuN7hebzFyiOKt1u3_q/view
- Faruk, F. (2013). *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foulcher, K. (1987). Politics and literature in independent Indonesia: The view from the left. *Asian Journal of Social Science*. <https://doi.org/10.1163/080382487X00073>
- Foulcher, K. (2008). Larut di Tempat yang Belum Terbentuk: Mimikri dan Ambivalensi dalam “Sitti Noerbaja” Marah Roesli. In K. Foulcher, T. Day, & K. S. Toer (Eds.), *Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial* (Rev Clearing a Space). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hefner, R. W. (2017). Introduction Multiculturalism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia. In *The Politics of Multiculturalism* (pp. 1–58). <https://doi.org/10.1515/9780824864965-002>
- Iskandar, N. S. (2011). *Hulubalang Raja*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Johns, A. H. (1979). *Cultural Options and the Role of Tradition: A Collection of Essays on Modern Indonesian and Malaysian Literature*. Australian National University, Canberra.
- Karsono, S. (2021). Flâneur, Popular Culture and Urban Modernity: An Intellectual History of New Order Jakarta. *Asian Studies Review*, 45(2). <https://doi.org/10.1080/10357823.2020.1784092>
- Karsono, S. (2022). The City, the Body, and the World of Things. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 178(2–3), 192–224. <https://doi.org/10.1163/22134379-bja10038>

Atikurrahman, Laili & Ridwan

Kroeskamp, H. (1931). *De Westkust en Minangkabau 1665-1668*. Utrecht: Drukkerij Fa. Schotanus & Jens.

Kuntowijoyo. (2004). Sejarah / Sastra. *Humaniora*, 16(1), 17-26.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jh.803>

Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Munslow, A. (2006). *Deconstructing History* (Second). London: Routledge.

Nur, M. (2014). Bandar Tiku di Bagian Barat Sumatra: Kejayaan Ekonomi Yang Telah Hilang. *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah*, 4(2). Retrieved from
<http://jas.fib.unand.ac.id/index.php/JAS/article/view/54>

Purwanto, B. (2001). Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesiasentris. *Humaniora*, 13(1). Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/709>

Ricklefs, M. C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern* (D. Hardjowidjono, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Setiadi, H. F. (1991). Kolonialisme dan Budaya: Balai Poestaka di Hindia Belanda. *Jurnal Prisma*, 10(Peralihan Budaya Mencipta Makna), 23-46. Retrieved from
<http://hilmarfarid.id/kolonialisme-dan-budaya-balai-poestaka-di-hindia-belanda/>

Shiraishi, T. (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Siegel, J. T. (1979). *Shadow and Sound: The Historical Thought of a Sumatran People*. Chicago: University of Chicago Press.

Siegel, J. T. (2021). Fetish, Recognition, Revolution. In *Fetish, Recognition, Revolution*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv18zhd38>

Teeuw, A. (1967). *Modern Indonesian Literature*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-94-015-0768-4>

Tickell, P. (2008). Cinta di Masa Kolonialisme: Ras dan Percintaan dalam Sebuah Novel Indonesia Awal. In K. Foulcher, T. Day, & K. S. Toer (Eds.), *Sastra Indonesia Modern: Kritik Postkolonial* (Rev Clearing a Space). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Atikurrahman, Laili & Ridwan

Tickell, P. G. (1982). *Good Books, Bad Books, Banned Books: Literatures, Politics and The Pre-War Indonesian Novel*. Monash University, Melbourne.

Wartini, W. (2015). *Representasi Peristiwa Sejarah Minangkabau dalam novel Hulubalang Raja Karya Nur St. Iskandar* (STKIP PGRI Sumatera Barat). Retrieved from <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/7792/>

Williams, R. (2015). *Culture and Society: Coleridge to Orwell*. New York: Random House.

Yamamoto, N. (2019). Censorship in colonial Indonesia, 1901–1942. In *Library of the Written Word* (Vol. 75). <https://doi.org/10.1080/0967828x.2020.1775416>